



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan;
  - b. bahwa telah diterima surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/238/ST untuk menindaklanjuti permasalahan Eks Anggota Gafatar;
  - c. bahwa telah diterima surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia perihal Pemulangan Eks Gafatar ke Asal Daerah Masing-Masing;
  - d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sosial Gerakan Fajar Nusantara telah ditetapkan;
  - e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 162 menyatakan dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46.1);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

|                                     |     |                             |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a). Semula                          | Rp. | 3.921.068.617.127,00        |
| b). Bertambah/(berkurang)           | Rp. | 0,00                        |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. | <u>3.921.068.617.127,00</u> |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

|   |     |                             |
|---|-----|-----------------------------|
| a). Semula                                      | Rp. | 2.070.916.316.654,80        |
| b). Bertambah/(berkurang)                       | Rp. | <u>(1.154.308.300,00)</u>   |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. | <u>2.069.762.008.354,80</u> |

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

|  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| a). Semula                               | Rp. | 150.710.364.228,00        |
| b). Bertambah/(berkurang)                | Rp. | <u>303.000.000,00</u>     |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | <u>151.013.364.228,00</u> |

2). Belanja Barang dan Jasa

|  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| a). Semula                                       | Rp. | 1.020.959.720.157,00        |
| b). Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>851.308.300,00</u>       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | <u>1.021.811.028.457,00</u> |

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| 3). Belanja Modal                         |     |                      |
| a). Semula                                | Rp. | 947,405,795,147.00   |
| b). Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | 0.00                 |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan    | Rp. | 947,405,795,147.00   |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. | 2,120,230,187,832.00 |
| Jumlah Belanja                            | Rp. | 4,189,992,196,186.80 |
| Surplus/(Defisit)                         | Rp. | (268,923,579,059.80) |

### 3. Pembiayaan

#### a). Penerimaan

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1). Semula                                     | Rp. | 405.923.579.059,80 |
| 2). Bertambah/(berkurang)                      | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 405.923.579.059,80 |

#### b). Pengeluaran

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 1). Semula                                      | Rp. | 137.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang)                       | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 137.000.000.000,00 |

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 268.923.579.059,80

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2015  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

| Nomor Urut  | Uraian  | Jumlah (Rp)                 |                             | Bertambah / (Berkurang)   |              |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
|             |   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | (Rp)                      | %            |
| 1           | 2   | 3                           | 4                           | 5                         | 6            |
| <b>1.</b>   | <b>Pendapatan</b>   | <b>3,921,068,617,127.00</b> | <b>3,921,068,617,127.00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     | <b>1,553,180,369,527.00</b> | <b>1,553,180,369,527.00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0.00</b>  |
| 1.1.1.      | Pajak Daerah  | 1,377,156,182,800.00        | 1,377,156,182,800.00        | 0,00                      | 0.00         |
| 1.1.2.      | Hasil Retribusi Daerah  | 36,998,728,297.00           | 36,998,728,297.00           | 0,00                      | 0.00         |
| 1.1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                 | 57,398,373,585.00           | 57,398,373,585.00           | 0,00                      | 0.00         |
| 1.1.4.      | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                         | 81,627,084,845.00           | 81,627,084,845.00           | 0,00                      | 0.00         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dana Perimbangan</b>   | <b>1,768,771,681,000.00</b> | <b>1,768,771,681,000.00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0.00</b>  |
| 1.2.1.      | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak                    | 108,902,297,000.00          | 108,902,297,000.00          | 0,00                      | 0.00         |
| 1.2.2.      | Dana Alokasi Umum   | 940,835,434,000.00          | 940,835,434,000.00          | 0,00                      | 0.00         |
| 1.2.3.      | Dana Alokasi Khusus   | 719,033,950,000.00          | 719,033,950,000.00          | 0,00                      | 0.00         |
| <b>1.3.</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                       | <b>599,116,566,600.00</b>   | <b>599,116,566,600.00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0.00</b>  |
| 1.3.1.      | Pendapatan Hibah  | 10,956,017,600.00           | 10,956,017,600.00           | 0,00                      | 0.00         |
| 1.3.2.      | Dana Darurat  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0.00         |
| 1.3.3.      | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0.00         |
| 1.3.4.      | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus                               | 588,160,549,000.00          | 588,160,549,000.00          | 0,00                      | 0.00         |
| 1.3.5.      | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0.00         |
|             | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>3,921,068,617,127.00</b> | <b>3,921,068,617,127.00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Belanja</b>  | <b>4,189,992,196,186.80</b> | <b>4,189,992,196,186.80</b> | <b>0,00</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                     | <b>2,070,916,316,654.80</b> | <b>2,069,762,008,354.80</b> | <b>(1,154,308,300.00)</b> | <b>-0.06</b> |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai   | 632,402,208,576.00          | 632,402,208,576.00          | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.2.      | Belanja Bunga   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.3.      | Belanja Subsidi   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.4.      | Belanja Hibah   | 768,176,097,750.00          | 768,176,097,750.00          | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.5.      | Belanja Bantuan Sosial  | 4,683,000,000.00            | 4,683,000,000.00            | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.6.      | Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes             | 561,340,599,397.80          | 561,340,599,397.80          | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.7.      | Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes        | 91,814,410,931.00           | 91,814,410,931.00           | 0,00                      | 0.00         |
| 2.1.8.      | Belanja Tidak Terduga   | 12,500,000,000.00           | 11,345,691,700.00           | (1,154,308,300.00)        | -9.23        |
| <b>2.2.</b> | <b>Belanja Langsung</b>   | <b>2,119,075,879,532.00</b> | <b>2,120,230,187,832.00</b> | <b>1,154,308,300.00</b>   | <b>0.05</b>  |
| 2.2.1.      | Belanja Pegawai   | 150,710,364,228.00          | 151,013,364,228.00          | 303,000,000.00            | 0.20         |

|        |                          |                             |                             |                |             |
|--------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 2.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa  | 1,020,959,720,157.00        | 1,021,811,028,457.00        | 851,308,300.00 | 0.08        |
| 2.2.3. | Belanja Modal            | 947,405,795,147.00          | 947,405,795,147.00          | 0,00           | 0.00        |
|        | <b>JUMLAH BELANJA</b>    | <b>4,189,992,196,186.80</b> | <b>4,189,992,196,186.80</b> | <b>0,00</b>    | <b>0.00</b> |
|        | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b> | <b>(268,923,579,059.80)</b> | <b>(268,923,579,059.80)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0.00</b> |

| Nomor Urut  | Uraian  | Jumlah (Rp)               |                           | Bertambah / (Berkurang) |             |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|             |   | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | (Rp)                    | %           |
| 1           | 2   | 3                         | 4                         | 5                       | 6           |
| <b>3.</b>   | <b>Pembiayaan</b>   | <b>268,923,579,059.80</b> | <b>268,923,579,059.80</b> | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |
| <b>3.1.</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                           | <b>405,923,579,059.80</b> | <b>405,923,579,059.80</b> | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |
| 3.1.1.      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya       | 405,923,579,059.80        | 405,923,579,059.80        | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.2.      | Pencairan Dana Cadangan                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.3.      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.4.      | Penerimaan Pinjaman Daerah                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.5.      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.6.      | Penerimaan Piutang Daerah                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.7.      | Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.1.8.      | Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
|             | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                           | <b>405,923,579,059.80</b> | <b>405,923,579,059.80</b> | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |
| <b>3.2.</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                          | <b>137,000,000,000.00</b> | <b>137,000,000,000.00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |
| 3.2.1.      | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.2.2.      | Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah              | 137,000,000,000.00        | 137,000,000,000.00        | 0,00                    | 0.00        |
| 3.2.3.      | Pembayaran Pokok Utang  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.2.4.      | Pemberian Pinjaman Daerah                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.2.5.      | Penyelesaian Kegiatan D P A - L                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
| 3.2.6.      | Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0.00        |
|             | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                          | <b>137,000,000,000.00</b> | <b>137,000,000,000.00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |
|             | <b>PEMBIAYAAN NETO</b>  | <b>268,923,579,059.80</b> | <b>268,923,579,059.80</b> | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |
| <b>3.3</b>  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0.00</b> |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2015  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
**ORGANISASI** : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Nomor Urut                | Uraian   | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |       | Penjelasan                              |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|---|
|                           |  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %     |   |
| 1                         | 2  | 3                 | 4                 | 5                     | 6     | 7                                       |
| 1.19.1.19.01.00.00.4.     | <b>PENDAPATAN</b>  | 0.00              | 0.00              | 0.00                  | 0.00  |   |
|                           | Jumlah Pendapatan  | 0.00              | 0.00              | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.     | <b>BELANJA</b>   | 10,650,555,097.00 | 11,804,863,397.00 | 1,154,308,300.00      | 10.84 |   |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.   | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  | 4,933,816,872.00  | 4,933,816,872.00  | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. | Belanja Pegawai  | 4,933,816,872.00  | 4,933,816,872.00  | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.2.   | <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | 5,716,738,225.00  | 6,871,046,525.00  | 1,154,308,300.00      | 20.19 |   |
| 1.19.1.19.01.01.          | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN   | 1,181,522,700.00  | 1,181,522,700.00  | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.02.          | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  | 1,398,780,000.00  | 1,398,780,000.00  | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.05.          | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR  | 326,786,675.00    | 326,786,675.00    | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.06.          | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN           | 204,477,200.00    | 204,477,200.00    | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.18.          | PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN  | 793,010,000.00    | 793,010,000.00    | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.21.          | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT  | 194,371,950.00    | 194,371,950.00    | 0.00                  | 0.00  |   |
| 1.19.1.19.01.23.          | PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  | 1,617,789,700.00  | 2,772,098,000.00  | 1,154,308,300.00      | 71.35 |   |
| 1.19.1.19.01.23.017.      | KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN RISET/PENELITIAN          | 46,267,700.00     | 46,267,700.00     | 0.00                  | 0.00  | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY |
| 1.19.1.19.01.23.018.      | PENGAWASAN DAN KOORDINASI KEBERADAAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA | 148,000,000.00    | 148,000,000.00    | 0.00                  | 0.00  | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY |

| Nomor Urut                       | Uraian  | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |          | Penjelasan  |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|---|
|                                  |   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %        |   |
| 1                                | 2   | 3                 | 4                 | 5                     | 6        | 7   |
| 1.19.1.19.01.23.019.             | PENYELENGGARAAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, DAN KEMASYARAKATAN                                       | 264,000,000.00    | 264,000,000.00    | 0.00                  | 0.00     | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY                         |
| 1.19.1.19.01.23.020.             | PENDATAAN, IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN INVENTARISASI ORSOSPOL DAN ORMAS DI DIY                         | 38,000,000.00     | 38,000,000.00     | 0.00                  | 0.00     | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY                         |
| 1.19.1.19.01.23.021.             | KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) | 187,774,000.00    | 187,774,000.00    | 0.00                  | 0.00     | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY                         |
| 1.19.1.19.01.23.022.             | PENYELENGGARAAN CIPTA KONDUSIF DAERAH   | 383,748,000.00    | 1,538,056,300.00  | 1,154,308,300.00      | 300.80   | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY                         |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.1.       | Belanja Pegawai   | 264,400,000.00    | 567,400,000.00    | 303,000,000.00        | 114.60   |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.1.01.    | Honorarium P N S  | 118,750,000.00    | 118,750,000.00    | 0.00                  | 0.00     |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.1.01.01. | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   | 115,950,000.00    | 115,950,000.00    | 0.00                  | 0.00     | Lihat Peraturan Gubernur DIY No 119 Tahun 2015                  |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.1.01.07. | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan   | 2,800,000.00      | 2,800,000.00      | 0.00                  | 0.00     | Lihat Peraturan Gubernur DIY No 119 Tahun 2015                  |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.1.02.    | Honorarium Non P N S  | 145,650,000.00    | 448,650,000.00    | 303,000,000.00        | 208.03   |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.1.02.03. | Honorarium Harian Non PNS   | 145,650,000.00    | 448,650,000.00    | 303,000,000.00        | 208.03   | Honorarium Harian Non PNS 448,650,000                           |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.       | Belanja Barang Dan Jasa   | 119,348,000.00    | 970,656,300.00    | 851,308,300.00        | 713.30   |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis   | 2,800,000.00      | 12,060,800.00     | 9,260,800.00          | 330.74   |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor   | 2,800,000.00      | 10,260,800.00     | 7,460,800.00          | 266.46   | Belanja Alat Tulis Kantor 10,260,800                            |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas   | 0.00              | 1,800,000.00      | 1,800,000.00          | 0.00     | Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1,800,000                       |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.02.    | Belanja Bahan/ Material   | 0.00              | 492,000,000.00    | 492,000,000.00        | 0.00     |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-Obatan   | 0.00              | 25,000,000.00     | 25,000,000.00         | 0.00     | Belanja Bahan Obat-Obatan 25,000,000                            |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.02.08. | Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan   | 0.00              | 35,000,000.00     | 35,000,000.00         | 0.00     | Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 35,000,000                      |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.02.11. | Belanja Bahan Makanan   | 0.00              | 432,000,000.00    | 432,000,000.00        | 0.00     | Belanja Bahan Makanan 432,000,000                               |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor   | 14,586,000.00     | 25,086,000.00     | 10,500,000.00         | 71.99    |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.03.01. | Belanja Telepon   | 10,800,000.00     | 12,300,000.00     | 1,500,000.00          | 13.89    | Belanja Telepon 12,300,000                                      |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi Dan Akomodasi  | 3,786,000.00      | 12,786,000.00     | 9,000,000.00          | 237.72   | Belanja Transportasi Dan Akomodasi 12,786,000                   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.06.    | Belanja Cetak Dan Penggandaan   | 14,690,000.00     | 17,187,500.00     | 2,497,500.00          | 17.00    |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.06.01. | Belanja Cetak   | 10,000,000.00     | 12,025,000.00     | 2,025,000.00          | 20.25    | Belanja Cetak 12,025,000  |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan   | 4,690,000.00      | 5,162,500.00      | 472,500.00            | 10.07    | Belanja Penggandaan 5,162,500                                   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.08.    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas   | 0.00              | 49,200,000.00     | 49,200,000.00         | 0.00     |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 0.00              | 49,200,000.00     | 49,200,000.00         | 0.00     | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 49,200,000                  |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.11.    | Belanja Makanan Dan Minuman   | 29,640,000.00     | 51,840,000.00     | 22,200,000.00         | 74.90    |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   | 9,120,000.00      | 14,520,000.00     | 5,400,000.00          | 59.21    | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,520,000                    |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum   | 20,520,000.00     | 37,320,000.00     | 16,800,000.00         | 81.87    | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 37,320,000              |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.15.    | Belanja Perjalanan Dinas  | 22,032,000.00     | 191,682,000.00    | 169,650,000.00        | 770.02   |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 6,080,000.00      | 6,080,000.00      | 0.00                  | 0.00     | Lihat Peraturan Gubernur DIY No 119 Tahun 2015                  |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 15,952,000.00     | 185,602,000.00    | 169,650,000.00        | 1,063.50 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 185,602,000                |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.36.    | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber  | 35,600,000.00     | 131,600,000.00    | 96,000,000.00         | 269.66   |   |
| 1.19.1.19.01.23.022.5.2.2.36.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.   | 35,600,000.00     | 131,600,000.00    | 96,000,000.00         | 269.66   | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 131,600,000 |
| 1.19.1.19.01.23.023.             | KOORDINASI KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL   | 550,000,000.00    | 550,000,000.00    | 0.00                  | 0.00     | Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY                         |
|                                  | Jumlah Belanja  | 10,650,555,097.00 | 11,804,863,397.00 | 1,154,308,300.00      | 10.84    |   |

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN  
**ORGANISASI** : 1.20.09. - P P K D / B U D

| Nomor Urut                      | Uraian   | Jumlah (Rp)                 |                             | Bertambah/(Berkurang)    |              | Penjelasan  |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|---|
|                                 |  | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | (Rp)                     | %            |   |
| 1                               | 2  | 3                           | 4                           | 5                        | 6            | 7   |
| 1.20.1.20.09.00.00.4.           | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>2,367,888,247,600.00</b> | <b>2,367,888,247,600.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
|                                 | Jumlah Pendapatan  | 2,367,888,247,600.00        | 2,367,888,247,600.00        | 0.00                     | 0.00         |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.           | <b>BELANJA</b>   | <b>1,438,514,108,078.80</b> | <b>1,437,359,799,778.80</b> | <b>-1,154,308,300.00</b> | <b>-0.08</b> |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.         | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                | <b>1,438,514,108,078.80</b> | <b>1,437,359,799,778.80</b> | <b>-1,154,308,300.00</b> | <b>-0.08</b> |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.       | <b>Belanja Hibah</b>   | <b>768,176,097,750.00</b>   | <b>768,176,097,750.00</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.       | <b>Belanja Bantuan Sosial</b>                                | <b>4,683,000,000.00</b>     | <b>4,683,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.       | <b>Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes</b> | <b>561,340,599,397.80</b>   | <b>561,340,599,397.80</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.       | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan</b>   | <b>91,814,410,931.00</b>    | <b>91,814,410,931.00</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.       | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                                 | <b>12,500,000,000.00</b>    | <b>11,345,691,700.00</b>    | <b>-1,154,308,300.00</b> | <b>-9.23</b> |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.    | <b>Belanja Tidak Terduga.</b>                                | <b>12,500,000,000.00</b>    | <b>11,345,691,700.00</b>    | <b>-1,154,308,300.00</b> | <b>-9.23</b> |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.01. | Belanja Tidak Terduga.                                       | 12,500,000,000.00           | 11,345,691,700.00           | -1,154,308,300.00        | -9.23        | Belanja Tidak Terduga. 11,345,691,700                           |
|                                 |  |                             |                             |                          |              | 00.01. Belanja Tidak Terduga 1 @12.500.000.000 = 11,345,691,700 |
| 1.20.1.20.09.00.00.5.2.         | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
|                                 | Jumlah Belanja   | 1,438,514,108,078.80        | 1,437,359,799,778.80        | -1,154,308,300.00        | -0.08        |   |
| 6.                              | <b>Pembiayaan</b>  | <b>268,923,579,059.80</b>   | <b>268,923,579,059.80</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |   |
|                                 | Pembiayaan neto  | 268,923,579,059.80          | 268,923,579,059.80          | 0.00                     | 0.00         |   |
| 1.20.1.20.09.00.00.6.3.         | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)      | 1,198,297,718,581.00        | 1,199,452,026,881.00        | 1,154,308,300.00         | 0.10         |   |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001